

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendagri No.113 tahun 2014 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa merupakan penyempurna dari permendagri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Permendagri No.113 tahun 2014 telah memperjelas struktur pengelolaan desa, alur pengelolaan desa, dan memperbaharui klasifikasi APBDes sehingga lebih mudah dan lebih jelas tentang struktur, alur, dan pengelompokkannya (Fachturahman, 2015).

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang membahas tentang Pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan kepada perangkat desa untuk mempraktikkan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan keuangan (Liando *et al.*, 2017). Sehingga dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan responsibilitas, desa juga dapat mengelola keuangan dan melaporkan secara transparan, tertib dan disiplin anggaran terutama pada APBDes. Jadi, tata pemerintahan yang baik bisa dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Yuliansyah dan Rusmianto, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun ke depan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa dan sesuai

pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Hal ini tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemampuan aparatur desa saja tidak cukup tanpa adanya masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan desa. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Puspitasari, 2016).

Menurut Relianus (2016) Permasalahan desa sekarang menjadi topik utama oleh banyak kalangan, baik itu kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Mulai dari pejabat, akademisi, politikus, pengamat, maupun masyarakat mencari tahu tentang permasalahan desa dari dekat. Banyaknya perhatian beberapa pihak mengenai desa dikarenakan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Topik tentang desa sendiri timbul dikarenakan pemerintah menjanjikan pemberian dana yang besar untuk memajukan desa. APBDes juga menjadi sorotan publik mengenai penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Banyak sekali desa yang masih belum menerapkan sepenuhnya Peraturan Pemerintah mengenai APBDes. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang berkewajiban untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi saat ini. Adanya

kepercayaan baru seperti itu, maka pemerintah memberikan otonom kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri desanya agar berhasil dalam melayani masyarakat (Marchelino, 2013).

Liando *et al.* (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa di desa Kolongan pengelolaan keuangannya sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, hanya saja SDMnya yang belum memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian Yatminiwati (2017) juga membahas tentang Implementasi pengelolaan dan penatausahaan desa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang) memberikan hasil bahwa Desa Tempeh sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Penelitian ini menjadi penting diteliti karena perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban menjadi hal yang harus dilakukan dengan benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Karena setiap desa pasti sudah memiliki standar atau

pedoman yang sudah diatur, dan juga seharusnya standar atau pedoman itu sesuai dengan peraturan pemerintah agar tidak menyeleweng. Masyarakat juga seharusnya ikut andil atau mengetahui tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang diatur desa. Penulis memilih Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa serta sumber daya untuk mengelola, merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkannya sesuai Permendagri No.113 tahun 2014.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitiannya dapat membantu Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes agar sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk tambahan pengetahuan serta literatur ilmu akuntansi sektor publik tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

